

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PENDAPATAN
DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Dimas Indra Setiawan

312131875

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2023

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 - 2022

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DIMAS INDRA SETIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa: 312131875

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 19 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Erlina Herowati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Baldric Siregar, Prof., Dr., M.B.A., CMA., Ak., CA.

Yogyakarta, 19 Juni 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020-2022

Dimas Indra Setiawan

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281
Email: dimasindra1310@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020-2022. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan Kota Magelang Tahun Anggaran 2020-2022 berdasarkan: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio Efektivitas, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (5) Rasio Keserasian dan pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik metode deskriptif kuantitatif dalam menganalisis data. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Kota Magelang dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sedang, karena rata-ratanya sebesar 33,60% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, pola hubungannya tergolong dalam pola hubungan partisipatif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 52,25% (3) Rasio Efektivitas terhadap kinerja keuangan Kota Magelang sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 128,87% (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Magelang sebesar 59,36% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 94,82% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 4,52% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah (6) rasio DDF (X1), rasio kemandirian keuangan (X2), dan rasio belanja modal (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y), sedangkan rasio efektifitas (X3), rasio efisiensi (X4), dan rasio belanja operasi (X5) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y).

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah perkumpulan yang difungsikan mengarahkan kepentingan bangsa dan negaranya. Instansi pemerintah dibentuk untuk melakukan dukungan ke wilayah lokal yang lebih luas dan sebagai asosiasi non-manfaat yang dibuat tidak untuk mencari keuntungan namun memberikan berbagai jenis bantuan untuk meningkatkan kemampuan bangsa dan negara di kemudian hari. Pemerintahan sendiri melakukan dorongan untuk memungkinkan daerah dalam menentukan keputusan dengan lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk menangani aset mereka sendiri sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang sebenarnya. Sasaran otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga lebih efektif dan efisien terhadap kebutuhan di daerah masing-masing.

Meski demikian, waktu otonomi daerah diberlakukan sampai sekarang, kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah di Indonesia masih mengandalkan penerimaan atau pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Ada berbagai perkembangan pada bidang moneter, sosial dan politik pada periode perubahan ini, hal ini berdampak pada cepatnya perubahan perilaku individu, terutama yang diidentikkan dengan permintaan publik untuk keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan, misal dalam hal pengambilan keputusan, pemberian pelayanan pemerintah yang lebih mengarah pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam pemerintah daerah diharuskan untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang memuaskan. Dengan tingkat kemandirian keuangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang lebih besar berarti bahwa daerah-daerah tersebut saat ini tidak akan terlalu bergantung pada pertolongan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan.

Halim (2014) menerangkan bahwa sifat utama daerah yang dapat melaksanakan pemerintahan sendiri, yaitu kemampuan keuangan daerah, menyiratkan bahwa daerah tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menyelidiki asal keuangan, mengawasi dan memanfaatkan keuangannya sendiri yang memadai untuk mendanai daerah sendiri, dan ketergantungan pada bantuan pusat wajib sesedikit mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai penilaian dan perbaikan kinerja melalui membandingkan rencana kerja dan penerapannya. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai patokan untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut, terutama keuangan pemerintah daerah dalam jangka waktu selanjutnya.

Penulis meneliti di BPKAD Kota Magelang karena permasalahan di lokasi tersebut lebih menonjol dalam artian dekat dengan domisili penulis, sehingga mudah akses untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji. Selain itu, jika semakin jauh lokasi penelitian dari domisili saya, maka semakin besar dana dan tenaga yang dicurahkan. Dengan adanya otonomi daerah telah membawa desentralisasi sistem pemerintahan di Kota Magelang, oleh karena itu Pemerintah Daerah Magelang selaku lembaga yang diberi tugas menjalankan roda pemerintahan, kemajuan pembangunan dan pelayanan harus menyajikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk menilai Pemerintah Daerah Magelang telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik atau tidak. Pemeriksaan pelaksanaan keuangan di BPKAD Kota Magelang merupakan interaksi evaluasi terhadap tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan BPKAD Kota Magelang di bidang moneter untuk jangka waktu tertentu. Melihat gambaran di atas, peneliti tertarik mengarahkan eksplorasi dengan membuat judul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020-2022”.

II. LANDASAN TEORI

RASIO KEUANGAN

Menurut Fahmi (2017), “Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula

yang dapat dianggap representatif untuk diterapkan”. Menurut Kamaludin dan Indriani (2021), “Rasio keuangan merupakan rasio yang dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan atau membantu untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan laporan keuangan perusahaan”. Berdasarkan pengertian di atas, ditarik kesimpulan bahwa rasio keuangan adalah rasio yang dihasilkan dimaksudkan agar dapat mengevaluasi dan menganalisis hasil usaha yang diperoleh selama satu periode akuntansi dan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Menurut Purba dan Hutabarat (2017) rasio derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan total pendapatannya. Proporsi ini menunjukkan tingkat komitmen PAD untuk menambah total pendapatan daerah. Semakin tinggi komitmen PAD, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Rumus tingkat desentralisasi fiskal sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Mahmudi (2019) rasio ini memperlihatkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintah sendiri, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

RASIO EFEKTIFITAS

Menurut Mohammad Mahsun (2016) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio efektifitas =

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH

Menurut Mohammad Mahsun (2016) rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) menggambarkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

RASIO KESERASIAN

Menurut Abdul Halim (2017) rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2017):

Rasio Belanja Operasi =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Arti kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penggambaran tentang tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mencapai tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mohammad Mahsun, 2016). Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham Fahmi, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu tingkat pencapaian hasil pekerjaan pada aspek keuangan daerah yang mencakup anggaran beserta realisasi anggaran yang ditetapkan melalui peraturan hukum yang ada, selama jangka waktu anggaran.

TUJUAN PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Menurut Mardiasmo (2017: 121), penilaian kinerja pemerintah dilaksanakan untuk memenuhi tujuan,:

1. Mengembangkan dan merevisi pelaksanaan kinerja pemerintah.
2. Bantuan dalam mendistribusikan sumber daya dan membuat pertimbangan.
3. Melaksanakan tanggung jawab umum dan merevisi cara komunikasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2022 Pemerintah Kota Magelang yang berlokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada bulan maret-mei tahun 2023.

SAMPEL DAN DATA PENELITIAN

Pada penelitian ini teknik sampling yang dipakai adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Maka sampel penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2020-2022.

JENIS DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2019:68) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan enam variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Maka definisi setiap variabel adalah sebagai berikut:

VARIABEL BEBAS (VARIABEL INDEPENDEN)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Menurut Sugiyono (2019:69), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan, sebagai berikut:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal (X1)
2. Rasio kemandirian keuangan daerah (X2)
3. Rasio efektifitas (X3)
4. Rasio efisiensi keuangan daerah (X4)

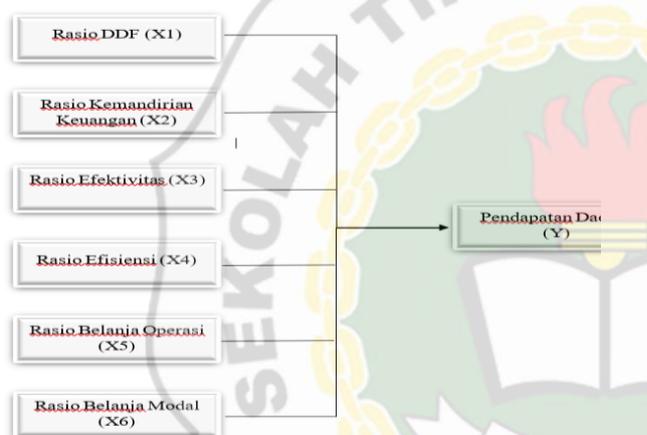
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Rasio belanja operasi (X5)
6. Rasio belanja modal (X6)

VARIABEL TERIKAT (VARIABEL DEPENDEN)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah diambil dari data laporan realisasi anggaran setiap akhir bulan untuk tahun 2020-2022.

MODEL PENELITIAN



Gambar 3.1

Gambar di atas menunjukkan variabel independen dan dependen penelitian ini. Dimana variabel independen terdiri dari rasio DDF (X1), rasio kemandirian keuangan (X2), rasio efektivitas (X3), rasio efisiensi (X4), rasio belanja operasi (X5), dan rasio belanja modal (X6). Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu pendapatan daerah (Y).

TEKNIK ANALISIS RASIO

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis rasio keuangan secara horizontal. Menurut Hery (2018:115-116) analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Sedangkan, analisis horizontal adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode.

TEKNIK ANALISIS REGRESI BERGANDA

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel

independen sebagai faktor predictor dinaik turunkan nilainya. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, maka ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan tersebut mencakup beberapa uji asumsi klasik seperti:

1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2019:92) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel mempunyai distribusi normal atau tidak. Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa setiap data variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Uji normalitas data menggunakan statistik SPSS kolomogrov smirnov dengan dasar pengambilan keputusan :

- Jika nilai signifikansi > 0.05 maka distribusi dari populasi normal.
- Jika nilai signifikansi < 0.05 maka distribusi dari populasi tidak normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:120). Model regresi yang baik bebas dari gejala heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikansi > 0.05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- Jika nilai signifikansi < 0.05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik bebas dari gejala autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji run test dengan dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikansi > 0.05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi.
- Jika nilai signifikansi < 0.05 maka terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi.

Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(hubungan) linear antara dua variabel, korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018:333).

Tabel 3.1

Interval Koefisien Determinasi

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0-0,199	Sangat Rendah
2	0,20-0,399	Rendah
3	0,40-0,799	Sedang
4	0,60-0,799	Kuat
5	0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber: Ghozali (2018)

Uji Hipotesis F dan T yang digunakan untuk pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan adalah hipotesis F. Sementara untuk pengaruh secara parsial digunakan hipotesis T. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), kemudian menetapkan signifikansi yang dipakai, yaitu 0,05 dengan kriteria:

- Jika nilai signifikansi hasil uji $> 0,05$ maka tidak berpengaruh signifikan.
- Jika nilai signifikansi hasil uji $< 0,05$ maka berpengaruh signifikan.

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, jika dilihat berdasarkan rata-rata keseluruhan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan Sedang. Dimulai pada tahun 2020, rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Magelang sebesar 33,07%, turun menjadi 30,27% pada tahun 2021, dan naik lagi sebesar 37,45% pada tahun 2022 dengan total rata-rata sebesar 33,60%. Meskipun mengalami lebih banyak kenaikan daripada penurunan, namun dapat dikatakan kemampuan keuangan BPKAD Kota Magelang sedang, karena masih berada dalam skala interval 30,01-40,00%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal selama tiga tahun pada Pemerintah Kota Magelang sedang karena berada dalam skala interval 30,01-40,00% yang berarti PAD memiliki kemampuan yang sedang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah juga meningkat dari tahun ke tahun, sehingga PAD memiliki andil dalam membiayai pembangunan daerah di Kota Magelang. Hal itu menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Magelang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan atas bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat mulai berkurang. Jadi, untuk ke depannya, Pemerintah Kota Magelang harus berupaya meningkatkan lagi PAD-nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada seperti BUMD maupun menggali potensi-potensi yang baru agar semakin baik.

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (RKKD)

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, jika dilihat berdasarkan rata-rata keseluruhan rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan dalam pola hubungan partisipatif. Pola hubungan partisipatif berarti tugas pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu menjalankan pemerintahan sendiri.. Dimulai pada tahun 2020, kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang sebesar 50,70% turun menjadi 44,33% pada tahun 2021, dan naik lagi sebesar 61,72% pada tahun 2022 dengan total rata-rata sebesar 52,25% berada dalam skala interval 51-75%.

Menurut uraian di atas, kemandirian keuangan Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern sedikit. Daerah mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga cukup tinggi dan dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Jadi, Pemerintah Kota Magelang harus mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi PAD-nya, misalnya pendirian atau peningkatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah ada.

RASIO EFEKTIFITAS

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, jika dilihat berdasarkan keseluruhan rasio efektivitas setiap akhir tahun pada bulan desember, maka dikategorikan efektif, karena nilai yang diperoleh lebih dari 100%. Dimulai pada tahun 2020, rasio efektivitas Pemerintah Kota Magelang sebesar 120,94%, naik drastis menjadi 150,05% pada tahun 2021, dan turun sebesar 115,62% pada tahun 2022 dengan total rata-rata sebesar 128,87%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Magelang juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Pemerintah Kota Magelang harus mempertahankan hal tersebut dengan terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Kota Magelang sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Kota Magelang harus mencari alternatif lain yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian atau peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah ada.

RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH (REKD)

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, jika dilihat berdasarkan rata-rata keseluruhan rasio efisiensi, maka dikategorikan efisien, karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%. Dimulai pada tahun 2020, rasio efisiensi Pemerintah Kota Magelang sebesar 55,55%, naik sebesar 59,27% pada tahun 2021, dan naik lagi sebesar 63,27% pada tahun 2022 dengan total rata-rata sebesar 59,36%. Hal ini disebabkan karena total belanja daerahnya tidak melebihi pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Magelang sudah sangat baik karena dapat mengurangi jumlah belanja daerahnya terhadap jumlah pendapatannya. Untuk ke depannya, Pemerintah Kota Magelang dapat

mempertahankan atau menyeimbangkan jumlah belanjanya dengan pendapatannya. Sehingga efisiensi belanja daerah dapat terus berlanjut di tahun-tahun selanjutnya.

RASIO KESERASIAN

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, jika dilihat berdasarkan rata-rata keseluruhan rasio keserasian, cukup stabil dari tahun ke tahun Dimulai dari rasio belanja operasi pada tahun 2020, yang rasionya sebesar 93,36%, naik sebesar 94,76% pada tahun 2021, dan naik lagi sebesar 96,34% pada tahun 2022 dengan total rata-rata sebesar 94,82%. Sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2020 sebesar 5,42% , turun pada tahun 2021 sebesar 4,93% , dan turun lagi pada tahun 2022 sebesar 3,22% dengan total rata-rata sebesar 4,52%.

Menurut uraian di atas,, sebagian besar aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Magelang masih difokuskan pada kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal sedikit. Hal ini dapat ditunjukkan dari rata-rata rasio belanja operasi yang sangat besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Distribusi dana yang besar untuk belanja operasi terutama disebabkan oleh banyaknya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Hasil rasio menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang yang lebih menitikberatkan pada pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan kurang memperhatikan pembangunan daerah.

UJI NORMALITAS

Tabel 4.1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	53.05093611
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.100
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146c

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sumber Data: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, persyaratan uji normalitas model regresi sudah terpenuhi.

UJI AUTOKORELASI

Tabel 4.2

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Valuea	-1.45626
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	21
Z	.507
Asymp. Sig. (2-tailed)	.612

Sumber Data: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,612 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai uji autokorelasi run test di atas, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian, persyaratan uji autokorelasi model regresi sudah terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Tabel 4.3

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	93.209	806.993		.116	.909
	DDF	8.833	12.098	1.287	.730	.471

Kemandirian Keuangan	-3.532	5.159	-1.217	-.685	.499
Efektivitas	-.102	.456	-.109	-.224	.824
Efisiensi	.778	.974	.396	.798	.431
Belanja Operasi	-2.095	8.133	-.301	-.258	.799
Belanja Modal	-1.985	9.066	-.252	-.219	.828

Sumber Data: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel DDF sebesar 0,471, kemandirian keuangan sebesar 0,499, efektivitas sebesar 0,824, efisiensi sebesar 0,431, belanja operasi sebesar 0,799, dan belanja modal sebesar 0,828. Dapat terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Tabel 4.4

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2755.376	1211.476		2.274	.031
	DDF	19.990	18.162	.390	1.101	.280
	Kemandirian Keuangan	-10.076	7.745	-.465	-1.301	.204
	Efektivitas	3.372	.684	.482	4.926	.000
	Efisiensi	4.885	1.463	.333	3.340	.002
	Belanja Operasi	-29.846	12.209	-.575	-2.444	.021
	Belanja Modal	-20.141	13.611	-.343	-1.480	.150

Sumber Data: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persamaan regresi $Y = 2.755,376 + 19.990 (X1) - 10.076 (X2) + 3.372 (X3) + 4.885 (X4) - 29.846$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(X5) -20.141 (X6). Konstanta (α) sebesar 2.755,376 berarti jika rasio DDF (X1), rasio kemandirian keuangan (X2) rasio efektivitas (X3), rasio efisiensi (X4), rasio belanja operasi (X5), dan rasio belanja modal (X6) secara serempak tidak ada perubahan atau sama dengan nol, maka besarnya Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 2.755,376 satuan.

Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari rasio DDF (X1) sebesar 19.990 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel rasio DDF (X1) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 19.990 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai b_2 yang merupakan koefisien regresi dari rasio kemandirian keuangan (X2) sebesar -10.076 yang artinya mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel rasio kemandirian keuangan (X2) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -10.076 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai b_3 yang merupakan koefisien regresi dari rasio efektivitas (X3) sebesar 3.372 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Rasio Efisiensi (X3) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 3.372 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai b_4 yang merupakan koefisien regresi dari rasio efisiensi (X4) sebesar 4.885 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel rasio efisiensi (X4) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 4.885 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai b_5 yang merupakan koefisien regresi dari rasio belanja operasi (X5) sebesar -29.846 yang artinya mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel rasio belanja operasi (X5) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -29.846 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai b_6 yang merupakan koefisien regresi dari rasio belanja modal (X6) sebesar -20.141 yang artinya mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel rasio belanja modal (X6) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -20.141 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

KOEFISIEN KORELASI (R) DAN DETERMINASI (R²)

Tabel 4.5
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983a	.966	.959	58.28114

Sumber Data: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai (R) yang dihasilkan adalah sebesar 0.983 artinya mempunyai hubungan sangat kuat. Nilai adj R square adalah 0,959 atau 95,6% Artinya pengaruh semua variable bebas : rasio DDF (X1), rasio kemandirian keuangan (X2), rasio efektivitas (X3), rasio efisiensi (X4), rasio belanja operasi (X5), dan rasio belanja modal (X6) terhadap variable independent Pendapatan Daerah adalah sebesar 95,6% dan sisanya sebesar 4,4% di pengaruhi variabel lain.

UJI F

Tabel 4.6
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2798795.756	6	466465.959	137.329	.000b
	Residual	98504.064	29	3396.692		
	Total	2897299.820	35			

a. Dependent Variable: Total Pendapatan

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, DDF, Efektivitas, Efisiensi, Belanja Operasi, Kemandirian Keuangan

Sumber Data: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan pada tabel di atas, di dapatkan nilai signifikansi 0.000. Nilai signifikansi 0.000 tersebut kurang dari 0,05 Maka dapat disimpulkan rasio DDF (X1), rasio kemandirian keuangan (X2), rasio efektivitas (X3), rasio efisiensi (X4), rasio belanja operasi (X5), dan rasio belanja modal (X6) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

UJI T

Tabel 4.7

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2755.376	1211.476		2.274	.031
	DDF	19.990	18.162	.390	1.101	.280
	Kemandirian Keuangan	-10.076	7.745	-.465	-1.301	.204
	Efektivitas	3.372	.684	.482	4.926	.000
	Efisiensi	4.885	1.463	.333	3.340	.002
	Belanja Operasi	-29.846	12.209	-.575	-2.444	.021
	Belanja Modal	-20.141	13.611	-.343	-1.480	.150
	a. Dependent Variable: Total Pendapatan					

Sumber Data: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa signifikansi DDF $0,280 > 0,05$ yang berarti rasio DDF (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y). Rasio kemandirian keuangan (X2) memiliki signifikansi $0,204 > 0,05$, yang berarti rasio kemandirian keuangan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y). Rasio efektifitas (X3) memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti rasio efektifitas (X3) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y). Rasio efisiensi (X4) memiliki signifikansi $0,002 < 0,05$, yang berarti rasio efisiensi (X4) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y). Rasio belanja operasi (X5) memiliki signifikansi $0,021 < 0,05$, yang berarti rasio belanja operasi (X5) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y). Rasio belanja modal (X6) memiliki signifikansi $0,150 > 0,05$, yang berarti rasio belanja modal (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sedang, ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang sedang dalam membiayai pembangunan daerah.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong cukup tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan partisipatif dimana tugas pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu menjalankan pemerintahan sendiri.
3. Kinerja Keuangan BPKAD Kota Magelang jika dilihat dari rasio efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2020 sampai dengan 2022 efektif, karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.
4. Kinerja Keuangan BPKAD Kota Magelang jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dikatakan efisien. Hal ini sangat baik karena Pemerintah Daerah Kota Magelang mampu mengurangi jumlah belanja daerahnya terhadap jumlah pendapatannya.
5. Kinerja Keuangan BPKAD Kota Magelang jika dilihat dari rasio keserasian sudah cukup stabil dari tahun 2020 sampai 2022, akan tetapi Pemerintah Kota Magelang masih berfokus pada belanja operasi sehingga rasio belanja modal sangat sedikit. Hal itu memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Magelang yang lebih menitikberatkan pada pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan kurang memperhatikan pembangunan daerah.
6. Rasio DDF (X1), rasio kemandirian keuangan (X2), dan rasio belanja modal (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y), sedangkan rasio efektifitas (X3), rasio efisiensi (X4), dan rasio belanja operasi (X5) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y).

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat meningkatkan PAD dengan melalui pengoptimalan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara memperkuat proses pemungutan seperti mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM dan meningkatkan pengawasan seperti

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus (petugas pajak). Pemerintah daerah juga harus mencari cara lain yang memungkinkan untuk mengatasi kurangnya pembiayaan, dimana dibutuhkan inovasi dan kreatifitas dari pihak pelaksana keuangan daerah untuk menemukan sumber pembiayaan baru, baik itu melalui kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta maupun program peningkatan PAD. Sebagai contoh pembentukan BUMD sektor potensial. Selain itu, Pemerintah Kota Magelang dapat mempertahankan atau menyeimbangkan jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya dan lebih memperhatikan pembangunan daerah.

2. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan melakukan penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio dan teknik analisis yang lebih beragam sehingga hasil penelitiannya dapat lebih reliabel dan akurat dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penelitian ini terbatas dilakukan di satu kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Magelang. Semoga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, S.N. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2017. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris. 2022. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kamaludin, dan Indriani. 2021. *Manajemen keuangan*. Bandung: CV Bandar Maju..
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2017. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pandjaitan, M., P. Tomi, dan V. N. Untu. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 6(3): 1398-1407.
- Purba, S. dan R.C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi.. *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1 (1) : 228-240.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: BPK RI.
- Sofyan, S. 2022. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuddin dan S. Nora. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5(1): 51-60.